



LAPORAN KINERJA
KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024 dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 ini merupakan implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Selama tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis Kantor Pelayanan Pajak Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2024 yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan ini akan dijabarkan hasil dan capaian atas pelaksanaan IKU, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang fluktuatif dan bergerak cepat, serta tuntutan masyarakat yang sangat dinamis, tugas pengelolaan keuangan negara, khususnya di bidang fiskal merupakan sebuah tantangan. Meski demikian, dengan berlandaskan visi dan misi yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan berupaya untuk mengatasi segala tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan.

LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap kinerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab, serta menjadi bahan analisis dan evaluasi untuk peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan di masa yang akan datang.



Ditandatangani secara elektronik
Imam Teguh Suyudi



BAB I

PENDAHULUAN

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan telah ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Penetapan tersebut merupakan wujud dari penyempurnaan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, pelayanan, pengawasan, penerimaan perpajakan, dan kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, KPP Pratama Pekanbaru Tampan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelayanan pajak;
2. Penyuluhan pajak;
3. Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
4. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penentuan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
5. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
6. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
7. Pencanan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
8. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan
9. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
10. Pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
11. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
12. Pemeriksaan pajak;
13. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
14. Penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
15. Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
16. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
17. Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
18. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;

19. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
20. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
21. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
22. Pelaksanaan administrasi kantor.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan merupakan sebuah satuan kerja vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Riau, Kementerian Keuangan. Sebagai sebuah organisasi instansi vertikal, KPP Pratama Pekanbaru Tampan memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung tercapainya tujuan Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, ditetapkan wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagian wilayah kota Pekanbaru yang meliputi 6 kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Bina Widya
2. Kecamatan Tuah Madani
3. Kecamatan Payung Sekaki
4. Kecamatan Marpoyan Damai
5. Kecamatan Bukit Raya
6. Kecamatan Sukajadi

Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah wilayah pengembangan kota Pekanbaru dengan kegiatan bisnis yang berkembang pesat di bidang Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Keuangan dan Administrasi; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Transportasi atau Pergudangan.

Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya penerimaan pajak dikarenakan masih kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, dan perubahan TUSI pengawasan yang berimplikasi pada perubahan Wajib Pajak yang berdasarkan Zona kewilayahan sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian dengan TUSI yang baru dan kendala aplikasi.

Berikut ini adalah komposisi SDM yang ada di KPP Pratama Pekanbaru Tampan per tanggal 22 Januari 2025 dengan jumlah total keseluruhan 106 orang pegawai adalah sebagai berikut:

Jumlah sumber daya manusia pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai
 - a) Pejabat Eselon III berjumlah 1 orang
 - b) Pejabat Eselon IV berjumlah 10 orang
 - c) Fungsional Pemeriksa Pajak berjumlah 21 orang
 - d) Asisten Fungsional Penilai Pajak berjumlah 1 orang
 - e) Fungsional Penyuluh Pajak berjumlah 3 orang
 - f) Asisten Fungsional Penyuluh Pajak berjumlah 2 orang
 - g) *Account Representative* berjumlah 35 orang
 - h) Juru sita berjumlah 2 orang
 - i) Bendaharawan berjumlah 1 orang
 - j) Sekretaris berjumlah 1 orang
 - k) Pelaksana berjumlah 29 orang
- b. Pramubakti berjumlah 7 orang
- c. Cleaning Service berjumlah 5 orang
- d. Satpam berjumlah 13 orang
- e. Supir berjumlah 1 orang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

KPP Pratama Pekanbaru Tampan memiliki 20 (Dua Puluh) Indikator Kinerja Utama yang terbagi dalam 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

1. Stakeholder Perspective (30%)
2. Customer Perspective (20%)
3. Internal Process Perspective (25%)
4. Learning & Growth Perspective (25%)

Adapun Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2024 untuk KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

6C-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan informasi yang berkualitas
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
Learning & Growth Perspective	
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Rencana strategis KPP Pratama Pekanbaru Tampan ke depan adalah sebagai berikut:

No	Nama Program	Nama Kegiatan
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Pengawasan Kepatuhan pembayaran rutin WP Prioritas dan WP lainnya, dan Inventarisasi WP terlambat Bayar dan terlambat lapor
		Penyampaian Informasi Pembayaran Pajak (IPP) kepada WP Strategis untuk Peningkatan Rasio Penyampaian SPT Tahunan dan Penerimaan Pajak (laporan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya)
		Pengawasan WP Prioritas dan WP lainnya (melalui MPN-info, Apportal, Approweb, SIDJP, dll)
		Koordinasi Bendahara dalam rangka memperoleh DIPA melalui BPKAD

		<p>Optimalisasi Kegiatan Pemblokiran rekening wajib pajak/penanggung pajak sebagai tindak lanjut pemanfaatan data program AEol</p>
		<p>Penyelesaian tunggakan pemeriksaan atas SP2</p>
2	Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak	<p>Himbauan Massal Pelaporan SPT Tahunan, baik melalui surat atau SMS blast.</p>
		<p>Identifikasi Wajib Pajak yang telah lapor SPT Tahun lalu dan tidak lapor</p>
		<p>Melaksanakan kelas pajak tentang pengisian SPT Tahunan (prioritas WP OP Karyawan secara online / efilling)</p>
		<p>Menyampaikan surat himbuan kepada Dinas/satker yang memiliki karyawan yg berjumlah besar untuk menerbitkan form 1721 A2 dan tawaran untuk melaksanakan kelas pajak pengisian SPT Tahunan Karyawan</p>
		<p>Memperbanyak sosialisasi efilling salah satunya melalui media sosial (instagram kpp tampan)</p>
3	Kegiatan Pendukung Lainnya	<p>Melakukan Kegiatan Penagihan secara optimal contohnya dengan Melakukan Profiling Wajib Pajak, Melakukan Asset Tracing, Meminta bantuan Kanwil untuk mendapatkan data dan informasi dari pihak ketiga, Melaksanakan Gelar Perkara, dan Melaksanakan Gelar Perkara</p>
		<p>Melakukan Peningkatan kualitas pemeriksaan khusus melalui Desentralisasi Peningkatan Kompetensi SDM Pemeriksa contohnya Bersinergi dengan Seksi Pengawasan atas penelitian SPT Lebih Bayar, Wajib Pajak disarankan untuk melakukan resitusi melalui mekanisme pengembalian pendahuluan</p>
		<p>Analisa Wajib Pajak</p>
		<p>Pengelolaan anggaran yang berkualitas</p>
		<p>Tata Usaha dan Rumah Tangga</p>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kerja Organisasi

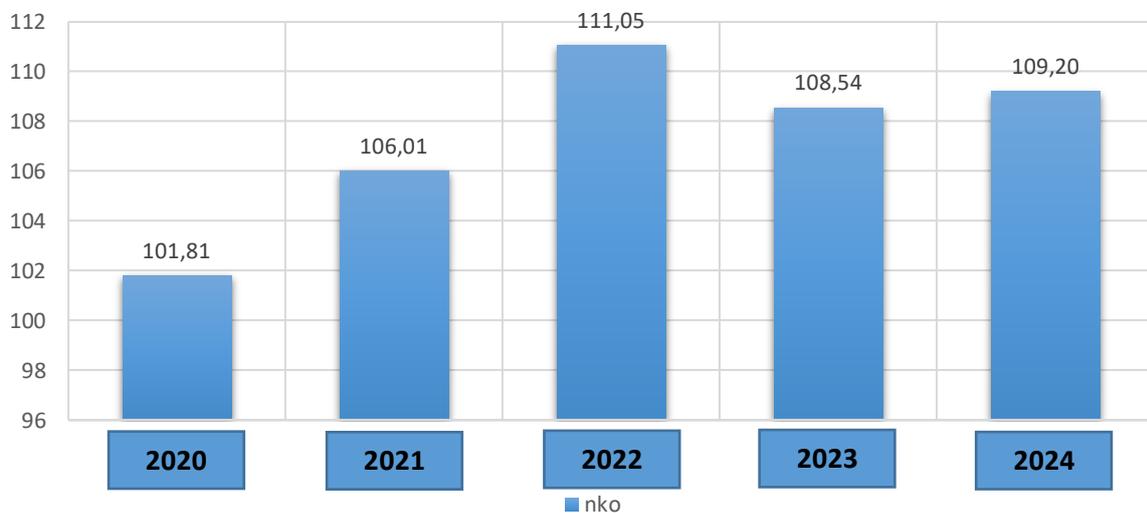
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Berikut adalah capaian Sasaran Strategis dan pengukuran Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun Anggaran 2024:

Kode	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot	Indeks
<i>Stakeholder Perspective</i>		30,00%						103,35
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							103,35
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,50%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,50
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	107,25	Max	P/L	19,00%	42,22%	107,25
<i>Customer Perspective</i>		20,00%						99,29
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							98,13
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,51%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,51
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	94,89%	Max	P/L	19,00%	42,22%	94,89
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,45
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,45%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,45
<i>Internal Process Perspective</i>		25,00%						117,10
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,18
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,35%	Max	E/M	21,00%	50,00%	106,35
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,77
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,31%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,31
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							112,56
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,52%	Max	P/M	14,00%	26,92%	119,52
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	120,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	85,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>		25,00%						116,21
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,42

9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,34	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,34
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,41
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,48	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,53
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,20

*data NKO per 15 Januari 2025

Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:



Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Dari rencana penerimaan KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2024 sebesar Rp. 3.368.212.330.000 yang ditetapkan oleh Kanwil DJP Riau, penerimaan netto yang berhasil diraih oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.385.193.599.636. Capaian penerimaan netto ini besarnya mencakup 100.5% dari total rencana penerimaan tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi s.d. Triwulan IV		KET
	%	Angka Mutlak	
1	2	3	4
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100.5%	3.385.193.599.636	Realisasi
		3.368.212.330.000	Target

Bulan	Netto Tahun 2021	Netto Tahun 2022	Netto Tahun 2023	Netto Tahun 2024	Tumbuh
Rp 1	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	%
Januari	84.512.442.192	162.864.741.825	222.484.068.819	249.809.366.426	12%
Februari	173.695.386.623	283.529.174.607	373.487.744.625	429.350.922.842	15%
Maret	316.582.216.954	457.198.524.820	568.993.164.915	647.007.777.437	14%
April	481.011.163.612	724.439.300.353	858.824.696.465	964.504.320.840	12%
Mei	608.963.629.886	936.097.230.733	1.075.599.489.608	1.199.067.483.538	11%
Juni	736.096.831.943	1.254.610.204.998	1.283.678.424.110	1.464.474.201.339	14%
Juli	876.447.754.662	1.455.725.932.554	1.535.420.222.744	1.780.198.887.955	16%
Agustus	1.034.708.249.441	1.646.917.111.560	1.783.022.875.187	2.066.486.843.778	16%
September	1.183.993.472.134	1.852.294.467.313	2.032.705.610.796	2.343.427.253.835	15%
Oktober	1.335.338.811.908	2.069.601.663.522	2.251.546.119.621	2.643.806.925.304	17%
November	1.515.654.556.895	2.281.237.905.704	2.500.314.860.000	2.974.064.816.102	19%
Desember	1.821.051.129.966	2.591.161.578.034	2.859.626.555.029	3.385.193.599.636	18%

***data tarikan per 21 Januari 2025**

- a. Realisasi kinerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2024 sebesar Rp 3.385.193.599.636 (kolom 6) mengalami kenaikan 18.22% dibandingkan dengan tahun lalu sebesar RP 2,863,588,157,869 (kolom 5)..
- b. Capaian kinerja tahun ini sebesar 100.5% dan mengalami pertumbuhan dibanding tahun lalu, yaitu sebesar 9.54%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di tahun 2024. Beberapa variabel keberhasilan KPP Pratama Pekanbaru Tampan dapat disebutkan sebagai berikut:

1) Ekstensifikasi dan Pengawasan

Keberhasilan dalam rangka ekstensifikasi dan penyuluhan wajib pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE)

Kuantitas						Kualitas			Bobot Kuantitas (75%)	Bobot Kualitas (25%)	Realisasi IKU	Capaian IKU (Maks 120%)
LHP2DKE Outstanding			Target TW 4 = 100%	Total Bobot Kuantitas	Realisasi%	Target	Realisasi	Realisasi%				
Jumlah SP2DKE	Jumlah TL	Bobot										
<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m=h+k</i>	<i>n=ml</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>r</i>	<i>s</i>	<i>t=r+s</i>	<i>u</i>
9.692	3.962	88.69	1.424	2,038,79	143.17%	569.60	831,00	145.89%	90.00%	36.47%	126.47%	120.00%
240	175	33.85	232	367,25	158.30%	92.80	171,50	184.81%	90.00%	46.20%	136.20%	120.00%

KPP Pratama Pekanbaru Tampan dapat mencapai realisasi maksimal dalam melaksanakan Kegiatan DSE. Dengan realisasi secara kuantitas mencapai sebesar **158.30%**, dan realisasi Kualitas Penambahan WP sebesar **184,81%**

b) Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL)

KPDL juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan target tahun 2024 tercapai, KPDL berguna untuk menambah basis data dalam penggalian potensi oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

2) Pengawasan

Keberhasilan dalam rangka pengawasan wajib pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Tindak Lanjut atas Data Pemicu
- b) Surat Tagihan Pajak
- c)

3) Wajib Pajak Kontribusi Terbesar

- a) 10 WP Penyumbang Terbesar Tahun 2024

No	NPWP	Nama WP	Netto 2024
1	750214991216000	SATELIT KOMUNIKA NUSANTARA	227,712,824,219
2	952397552216000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU	152,742,093,757
3	904859972216000	CITRA ANDALAN MOBILINDO CEMERLANG	101,160,994,735
4	952448082216000	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU	100,542,700,065
5	021797592218000	AWAL BROS PUTRA MEDIKA	46,979,002,230

6	925393241216000	HABCO TRANS MARITIMA TBK	43,612,653,218
7	811485317216000	RUSSINDO REKAYASA PRANATA	42,777,438,261
8	001734755216000	UNIVERSITAS RIAU SEKRETARIAT UTAMA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	41,270,647,458
9	715892329331000	SAWIT SUKSES SEJATI	28,409,820,183
10	125689877216000	DONGAN LAS ROHA	26,385,865,068

Untuk mencapai target penerimaan pajak periode selanjutnya, KPP Pratama Pekanbaru Tampan berkomitmen untuk melakukan berbagai rencana aksi, diantaranya adalah menyusun Rencana Kegiatan Tahun 2025, melakukan pengawasan intensif terhadap Wajib Pajak yang termasuk dalam DPP, WP Strategis, dan WP Wilayah dengan setoran yang besar diberbagai sektor, terutama di sektor Perdagangan Besar, Konstruksi, Jasa Kesehatan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Keuangan, dll.

1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Realisasi atas IKU ini di tahun 2024 adalah sebesar 107,25%.

Rencana Aksi yang akan dilakukan agar tercapainya IKU ini di periode berikutnya adalah melakukan pengawasan yang intensif terhadap WP Instansi Pemerintah, WP DPP, dan WP Strategis, serta tetap melakukan analisa yang baik dalam melakukan perencanaan *prognosa* penerimaan

2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

IKU ini merupakan IKU yang baru muncul di tahun 2021 dikarenakan Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak. Secara garis besar, Penerimaan dibagi menjadi 2 Kategori, yaitu Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM), agar lebih memahami, PPM adalah Penerimaan rutin, dan PKM adalah *extra effort*, namun terdapat sedikit perbedaan dalam definisi rutin dan extra effort disini, dimana PPM dan PKM dibedakan berdasarkan Tahun Pajaknya. Penerimaan Tahun pajak berjalan adalah PPM, dan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan adalah PKM.

IKU ini bertujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM). Capaian yang diperoleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah 100.51%, dengan Realisasi Angka Mutlak sebesar Rp. 3.166.331.426.984 Rp dari target 3.150.340.450.000. Lebih rendah dari realisasi tahun 2023 yaitu 110,14%.

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM

Data Penerimaan PPM PKM
Per Unit Kerja

2024 ▼ Januari ▼ Desember ▼ Pilih

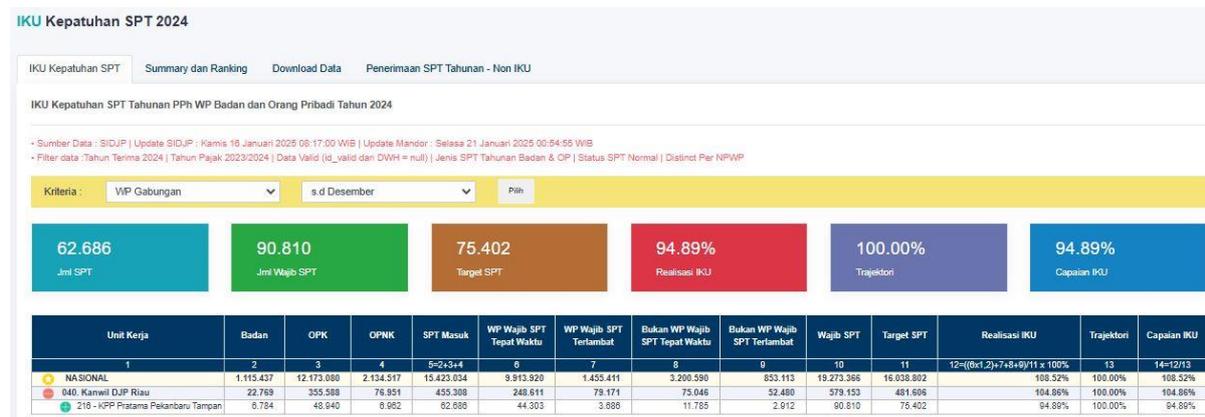
Unit Kerja	PPM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
040 - KANWIL DJP RIAU	21.413.654.904.000	21.459.328.417.313	100.21%	100.00%	100.21%
<u>216 - PRATAMA PEKANBARU TAMPAN</u>	3.150.340.450.000	3.166.331.426.984	100.51%	100.00%	100.51%

Rencana Aksi yang akan dilakukan agar IKU ini dapat tetap tercapai di periode selanjutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Wajib Pajak dengan penerimaan rutin yang besar, seperti WP Instansi Pemerintah, dll.

2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Badan dan OP yang diterima selama tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh dan SPT Tahun Pajak sebelum tahun berjalan) dengan jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember tahun 2023.

Target Angka Mutlak KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah 75.402 SPT, dan Realisasi sebanyak 62.686 SPT dilaporkan, dengan persentase capaian adalah 94,89%.



Capaian Tahun 2024 ini terhitung lebih baik dibandingkan Tahun 2023 lalu yaitu 86.99%, walaupun belum berhasil namun hal ini menunjukkan tren perbaikan dan akan tetap menjadi perhatian utama di tahun berikutnya dikarenakan belum mencapai target yang diinginkan yaitu >100%.

Belum tercapainya target Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi secara garis besar disebabkan karena beberapa faktor, yaitu masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan dan pemahaman WP terhadap kewajiban pelaporan SPT, serta kurangnya pemahaman Wajib Pajak dalam melakukan pengisian/pelaporan SPT secara *online*.

Rencana aksi yang akan dilakukan KPP Pratama Pekanbaru Tampan dalam rangka memenuhi target IKU ini di tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Identifikasi Wajib Pajak yang telah lapor SPT Tahun lalu dan tidak lapor
2. Mengirimkan himbauan penyampaian SPT.
3. Membuat dan mengirim surat himbauan kepada Dinas/satker yang memiliki karyawan yg berjumlah besar untuk menerbitka form 1721 A2 dan tawaran untuk melaksanakan kelas pajak pengisian SPT Tahunan Karyawan
4. Melaksanakan kelas pajak tentang pengisian SPT Tahunan (prioritas WP OP Karyawan secara online / efilling)
5. Himbuan penerbitan bukti potong A1 dan penyampaian SPT melalui e-filling kepada WP badan
6. Memperbanyak sosialisasi efilling salah satunya melalui media sosial (instagram kpp tampan)
7. Meningkatkan Layanan asistensi pengisian dan pelaporan SPT melalui penyuluhan kelas pajak.

8. Mengedukasi Wajib Pajak yang baru terdaftar untuk melaporkan SPT Tahunan
9. Menghimbau WP yang tahun lalu sudah Laport namun Tahun ini belum lapor.
10. Meningkatkan kegiatan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan.

3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Berbeda dengan IKU sebelumnya yang berfungsi untuk memantau penerimaan pengawasan pembayaran masa (PPM), IKU ini bertujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengujian kepatuhan material (PKM).

KPP Pratama Pekanbaru Tampan memperoleh Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sebesar 100,45% dengan realisasi sebesar Rp 218.862.172.652 dari Target Rp 217.871.880.000

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM

Data Penerimaan PPM PKM

Per Unit Kerja

2024 Januari Desember Pilih

Data update terakhir: 22-01-2025 07:56:20 WIB

	PPM				Target	PKM				Target	Penerimaan Total			
	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %		Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %		Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
4.000	21.458.328.417.313	100,21%	100,00%	100,21%	1.757.756.571.000	1.772.756.671.162	100,95%	100,00%	100,85%	23.171.411.475.000	23.232.085.088.475	100,26%	100,00%	100,26%
3.000	3.198.331.426.884	100,51%	100,00%	100,51%	217.871.880.000	218.862.172.652	100,46%	100,00%	100,45%	3.368.212.330.000	3.385.163.596.538	100,50%	100,00%	100,50%

Keterangan:

1. Data realisasi penerimaan menggunakan angka neto menu kinerja penerimaan pada aplikasi apportal.
2. Data PPM menggunakan angka penerimaan neto dikurangi penerimaan PKM.
3. Data PKM menggunakan angka penerimaan PKM pada aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM).
4. Data target penerimaan sesuai UU No. 19 TAHUN 2023 (UU APBN 2024).
5. Data trajectory target sesuai lampiran IV ND-31/PUU/21/2024.

Rencana Aksi yang akan dilakukan agar IKU ini tercapai di periode selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan mapping dan menerbitkan himbauan terhadap Wajib Pajak yang tahun sebelumnya bayar kemudian tahun ini belum bayar
2. Meningkatkan kegiatan penggalan potensi (produktivitas SP2DK yang berkualitas terkait PKM)
3. Melakukan analisa terhadap data pelaporan insentif covid tahun 2020 berdasarkan data BPK dan data dari KPDJP dan menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat himbauan
4. Peningkatan tindakan penagihan seperti Pemblokiran, soft collection, dan penagihan aktif terhadap 100 penunggak pajak terbesar
5. Mempercepat penyelesaian pemsus dengan SKP yang disetujui dan akan dibayar oleh Wajib Pajak
6. Melakukan Pengawasan Intensif terhadap WP DPP
7. Menerbitkan STP yang berkualitas sesuai Kriteria IKU yang ditetapkan

8. Menindaklanjuti Data Pemicu yang tersedia di Approweb
9. Menindaklanjuti SP2DK carryover tahun 2024 yang belum realisasi
10. Menggunakan data-data yang telah disuplai oleh kanwil sebagai bantuan dalam melakukan kegiatan gali potensi.

4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah Rincian atas Capaian IKU Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Kode Unit	Nama Unit	Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
				Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
		Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
216	PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	100.00 %	18.50 %	88.18 %	28.12 %	91.82 %	42.18 %	88.80 %	41.63 %	57.18 %	120.00 %	120.00 %
4114030000	KPP Pratama Pekanbaru Tampan	100.00 %	18.50 %	88.18 %	28.12 %	91.82 %	42.18 %	88.80 %	41.63 %	57.18 %	120.00 %	120.00 %

Breakdown Penghitungan Capaian Unit Kerja

4114030000 - KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Kegiatan					Perubahan Perilaku			Rasio		Capaian IKU				
	Rencana	Realisasi (Input)	Realisasi (Diakui)	%		Target	Perubahan Perilaku	%	Capaian	Proporsi	Trajektori	Realisasi		
Tema1	4	4	4		Bayar	110	101	91.82%	Kegiatan	100.00%	Q1	10.00%	120.00%	
Tema2	16	29	16		Lapor	110	97	88.18%	Perubahan Perilaku		Q2	40.00%	120.00%	
Tema3					Σ Nominal Bayar 3,461,673,746.00			88,80%	Bayar	91,82%	42.18%	Q3	60.00%	120.00%
One to One	10	84	10						Lapor	88,18%	28.12%	Q4	74.00%	120.00%
One to Many	10	33	10					Total		88,80%				
Total	40	150	40	100.00%										

Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah 88.00%, sehingga capaian IKU 4a-CP adalah 120.

4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif

diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

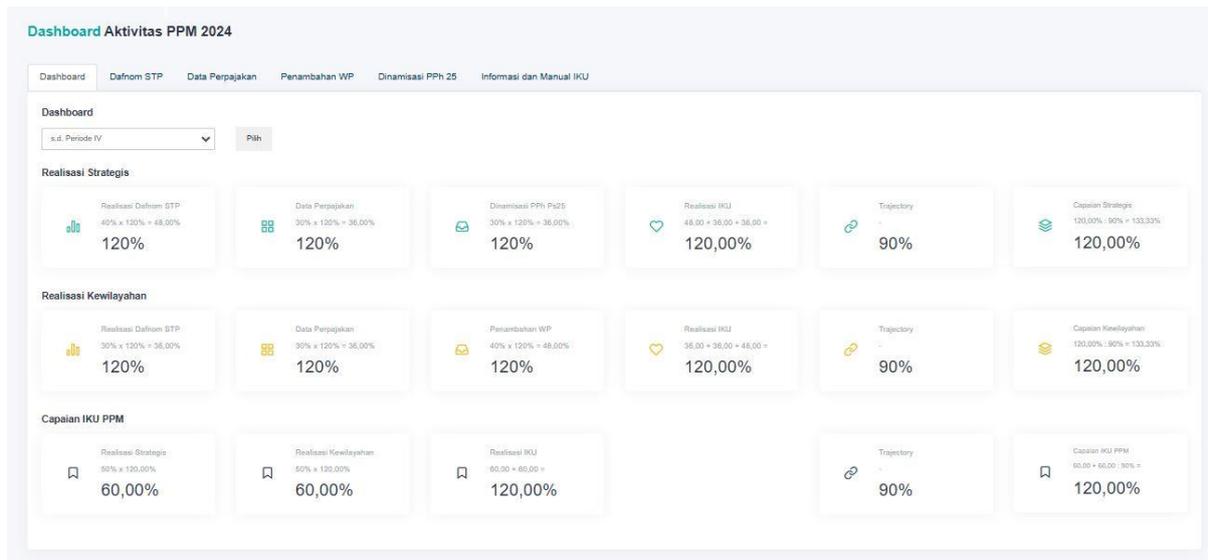
1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah 100% dengan realisasi sebesar 106,35% dan capaian IKU 106,35%.

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa ini adalah IKU yang terbagi atas pengawasan strategis dan kewilayahan dengan realisasi sebesar:

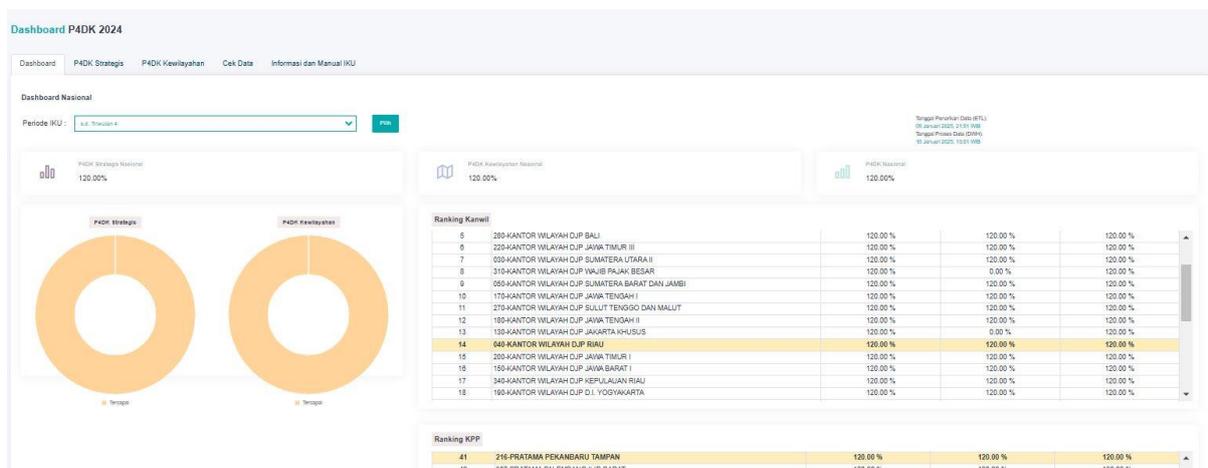


Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah 120%, sehingga capaian IKU 5a-CP adalah 120%.

6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penerbitan SP2DK dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

KPP Pratama Pekanbaru Tampan mencapai realisasi 120% dari target 100%.



Untuk menunjang tercapainya IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, segenap seksi terkait telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) Menerbitkan SP2DK yang berkualitas;
- b) Segera dan merekam LHP2DK atas tanggapan atau klarifikasi wajib pajak;
- c) Membuat LHPt Komprehensif terhadap Wajib Pajak Strategis;
- d) Melakukan Penelitian terhadap Wajib Pajak yang berada di X3Y3 pada Aplikasi Approweb;
- e) Menindaklanjuti LHA yang ada dengan SP2DK jika ditemukan potensi
- f) memanfaatkan data internal/eksternal dan hasil KPDL untuk dianalisis dan diterbitkan SP2DK
- g) Menindaklanjuti Data Pemicu yang tersedia di Approweb.

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan.

2. Pemanfaatan Data Matching

Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.

Dashboard IKU Pemanfaatan Data PKM 2024

Dashboard Rekapitulasi Kinerja DSTP Kinerja Data Matching Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi Data STP dan Data Pemicu
Per Unit Kerja

s.d. Periode IV Semua Pilih

Data update terakhir
Data STP 09-01-2025 00:00:00 WIB
Data Matching 31-12-2024 22:37:00 WIB

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP							Pemanfaatan Data Matching					Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
	Target		Realisasi			Persentase STP %	Target		Realisasi			Persentase Data Matching %	
	Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total		Nominal STP	Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WP		
040 - KANTOR WILAYAH DJP RIAU	12.330	13.170	16.053	7.121	23.150	287.893.774.383	120.00%	7.143	5.619	1.299	6.869	120.00%	120.00%
215 - PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	4.497	4.497	5.549	2.281	7.910	39.485.018.958	120.00%	2.410	1.915	370	2.285	120.00%	120.00%

KPP Pratama Pekanbaru Tampan memperoleh Realisasi sebesar 120% (maksimal)

6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Tujuan IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah untuk Memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan kepatuhan material

KPP Pratama Pekanbaru Tampan memperoleh realisasi sebesar 120% dari Target 100%, sehingga Capaiannya adalah 120%.

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan.

Secara realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 119,52 di Tahun 2024 berbanding 112,39 di Tahun 2023. Namun secara Capaian tetap berada di angka 120 (maksimal).

7b-CP Tingkat efektivitas penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan;
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC).

Realisasi atas IKU Tingkat efektivitas penagihan adalah 120% sehingga capaiannya adalah 120 (maksimal).

7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan

Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan bertujuan Untuk meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.

Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah 100%, sehingga capaian IKU 7c-N adalah 100%.

8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

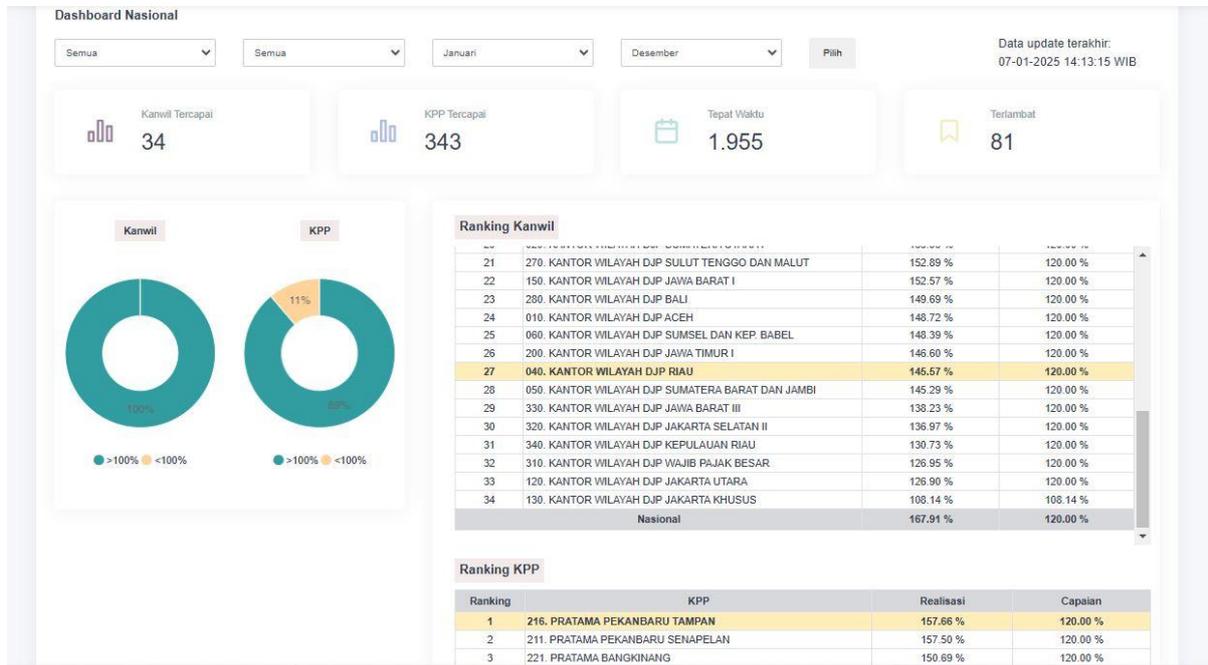
Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) berupa formulir pengumpulan data. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPD L sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang akurat dengan pelaksanaan geotagging objek pajak. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan banyaknya formulir pengumpulan data

yang telah tervalidasi. Formulir pengumpulan data lapangan ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDJ) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR)



IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan bertujuan Untuk menyediakan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan.

KPP Pratama Pekanbaru Tampan berhasil mencapai melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 120% dari Trajectory Target sebesar 100%. Sehingga capaian kinerjanya adalah 120 (maksimal).

8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP.

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2024 adalah data dengan periode data tahun 2023. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang

disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan

IKU ini bertujuan untuk mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPk-Pemerintah Daerah, serta bentuk kerja sama lainnya

KPP Pratama Pekanbaru Tampokan berhasil mencapai melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 85% dari Trajectory Target sebesar 55%. Sehingga capaian kinerjanya adalah 120 (maksimal).

9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Tahun 2024, realisasi atas IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah 117,34%.

Upaya yang telah dilakukan atas tercapainya IKU ini adalah selalu melakukan monitoring dan evaluasi atas seluruh pegawai yang mengerjakan pelatihan melalui e-learning, memantau pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi dengan memperhitungkan hasil pengukuran kompetensi (Assesment Center bagi Pejabat Struktural, Uji Kompetensi Teknis kenaikan jabatan bagi FPP, Penilai, dan Asisten Penilai, serta Uji Kompetensi Teknis Kenaikan peringkat bagi Pelaksana Umum)

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA. Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA dan survei dilaksanakan oleh Kantor Wilayah. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

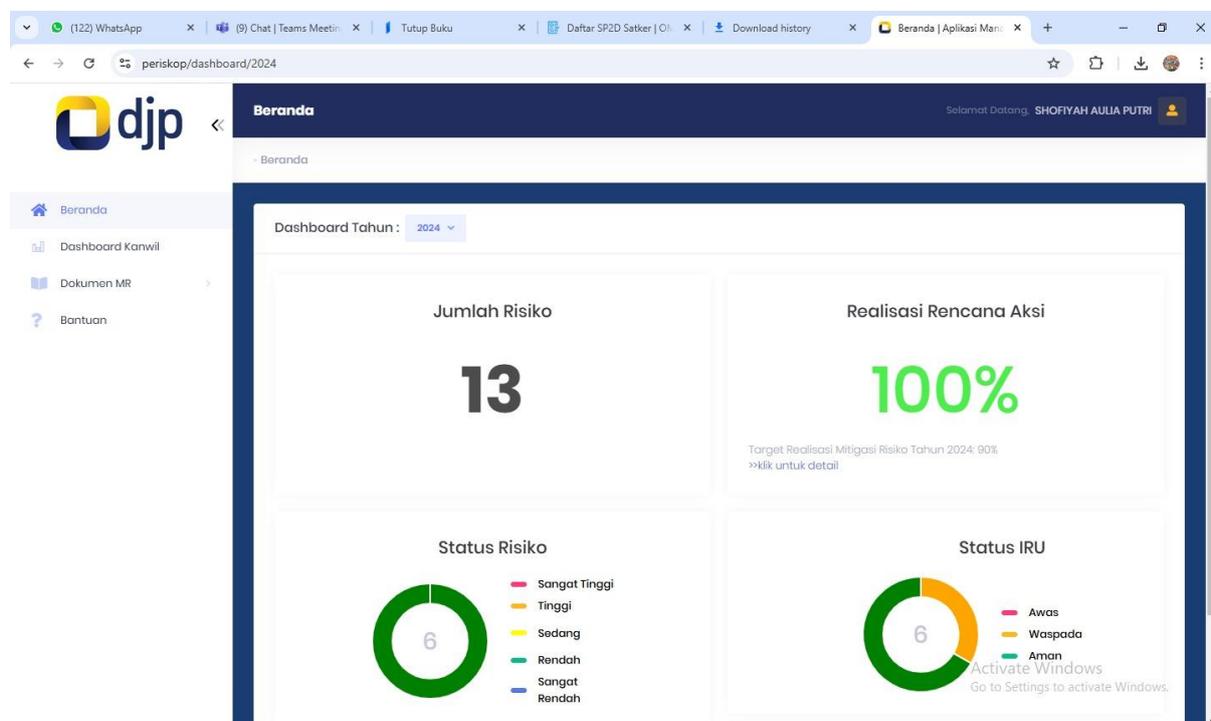
KPP Pratama Pekanbaru Tampan memperoleh realisasi sebesar 93% dari Target 85%, sehingga Capaiannya adalah 109,41%.

Upaya yang dilakukan KPP adalah selalu memberikan pelayanan kepada stakeholder secara profesional dan berintegritas.

9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja organisasi dan risiko serta meminimalkan terjadinya risiko dan dampak risiko yang timbulkannya, sesuai dengan sasaran strategisnya yaitu organisasi yang *fit for purpose*, sehingga bisa menjadi organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Secara umum, pelaksanaan Manajemen Kinerja dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan KPP Pratama Pekanbaru Tampan dari waktu ke waktu sudah dilakukan dengan baik dan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dari pelaksanaan IKU yang selalu mendapat capaian realisasi diatas target yang telah ditetapkan.



Jenis risiko yang dipilih beserta rencana aksi yang diambil dalam hal penanganan risiko tersebut berdasarkan tabel menunjukkan bahwa, risiko-risiko yang dikhawatirkan akan menghambat capaian kinerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan semuanya terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini memperlihatkan bahwa proses mitigasi risiko dalam hal upaya mengurangi dampak dari risiko tersebut adalah berhasil.

10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Dalam Peta Strategis IKU, persentase indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran berada pada perspektif *Learning and Growth* dan menjadi indikator dari pelaksanaan anggaran yang optimal. Pelaksanaan anggaran yang optimal menunjang pelaksanaan kegiatan KPP Pratama Pekanbaru Tampan untuk mewujudkan sasaran strategis pada Renstra DJP yang pada akhirnya turut pula mendukung tujuan utama DJP untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Di tahun 2024, KPP Pratama Pekanbaru Tampan Realisasi IKUnya adalah 120%, sehingga indeks capaian yang didapat KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah 120%, di Tahun 2024,

Kualitas pelaksanaan anggaran pada akhir tahun 2024 terbagi sebagai berikut:

Indikator Pelaksanaan Anggaran														EXCEL	PDF	FILTER
NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	008	015	635600	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	Nilai	100.00	94.63	99.63	100.00	100.00	100.00	100.00	99.12	100%	0.00	99.12
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.19	19.93	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek:		97.32			99.91		100.00				

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Dashboard



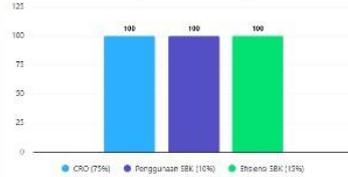
Nilai Kinerja Anggaran

Sangat Baik



5

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran



*Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pembebanan SBK untuk menilai Efisiensi!

5

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Desember

Progress Rincian Output



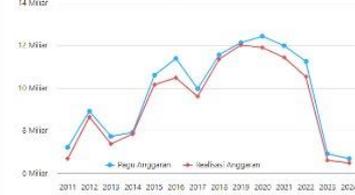
Data Anomali

Kondisi	Keterangan	Jumlah RO	Persentase
Case 1	PERIOD 01 periode 2 meskipun telah ada realisasi anggaran	0	0%
Case 2	PERIOD 01 periode lebih rendah daripada realisasi anggaran	0	0%
Case 3	PERIOD 00% namun capaian fisik (RO) masih 0	0	0%
Case 4	PERIOD 00% namun capaian fisik (RO) tidak mencapai 10 persentase DIPA	0	0%

Menampilkan 1 sampel dari 4 entri

Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2024

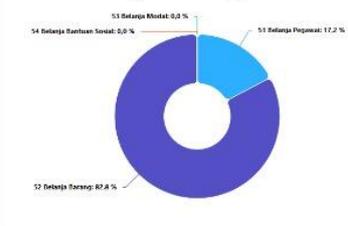


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

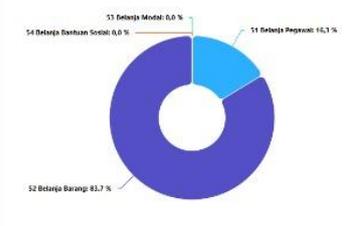
Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	1.150.985.000	1.055.976.000	91.75%
52 Belanja Barang	5.542.679.000	5.433.050.511	97.85%
53 Belanja Modal	0	0	nan%
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00%

Menampilkan 1 sampel dari 4 entri

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



Partisipasi Satuan Kerja

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des
1	03001	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menampilkan 1 sampel dari 1 entri

Untuk menunjang tercapainya IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran di periode selanjutnya, seksi terkait telah melakukan upaya untuk meningkatkan nilai komponen efisiensi sesuai dengan arahan kantor pusat, yaitu:

1. Perencanaan belanja dan melaksanakan revisi Hal III DIPA setiap awal triwulan.
2. Melaksanakan penyerapan anggaran sesuai target penyerapan anggaran pada IKPA (90% atas total pagu pada triwulan IV).
3. Pengelolaan Uang Persediaan dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara tepat waktu.
4. Melakukan perekaman data Evaluasi Kinerja Anggaran pada laman SMART terkait data Realisasi Volume Keluaran (RVK) dan Realisasi Indikator Keluaran Kegiatan (RIKK) yang berpengaruh pada Capaian Keluaran Kegiatan serta Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Tepat Waktu.
5. Berkoordinasi dan bersinergi antar pegawai tim keuangan dan operator SPMKP di seksi pelayanan terkait tupoksi, penyerapan belanja barang, belanja modal, maupun belanja pegawai, dan pencapaian IKU kualitas pelaksanaan anggaran.
6. Berkoordinasi dengan PBJ dan rekanan terkait batas waktu penyampaian data kontrak dengan tepat waktu

BAB IV

PENUTUP

LAKIN KPP Pratama Pekanbaru Tampan merupakan hasil evaluasi kinerja kantor selama satu tahun anggaran sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Pekanbaru Tampan selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik tetapi sebagian juga ada yang masih berada di bawah target. Hasil dari laporan kinerja organisasi ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan bagi pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan di tahun yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu menghimpun penerimaan negara, KPP Pratama Pekanbaru Tampan sudah cukup baik. Namun, masih dapat ditingkatkan dengan cara:

- a. Perencanaan yang lebih matang;
- b. Perlu mengadakan *sharing session* ketika manual IKU Tahun 2025 sudah diturunkan agar seragamnya pemahaman atas masing-masing IKU yang krusial;
- c. Pembuatan inisiatif strategi yang meliputi, Pengawasan, Penyuluhan, Pemeriksaan dan Penagihan; dan
- d. Dalam Pelaksanaan inisiatif strategi perlu adanya bimbingan serta pengawasan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang.